



SIARAN PERS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Opini WTP untuk LKPD 3 Kabupaten TA 2016

Banda Aceh, Jumat (2 Juni 2017), BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 3 Kabupaten Tahun Anggaran 2016. Adapun 3 Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Nagan Raya.

BPK menyampaikan apresiasi kepada 3 Kabupaten tersebut dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2016 (*unaudited*) yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opini atas LKPD untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Nagan Raya untuk Tahun Anggaran 2016 adalah "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atau "*Unqualified Opinion*".

Perlu dipahami bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah karena opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" laporan keuangan **bukan** merupakan "**jaminan**" tidak adanya *fraud* di kemudian hari.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak semata-mata dilihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Nagan Raya segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (*action plan*). [.]

(SUBBAG HUMAS DAN TU KEPALA PERWAKILAN)

Informasi Lebih Lanjut :

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Telp. 0651-32627

Faks. 0651-21166